

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan kota besar lainnya di Indonesia, sering dijumpai sosok pengemis. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum atau ke rumah-rumah dengan cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain.¹ Sedangkan mengemis adalah sebutan untuk pekerjaan atau kegiatan atau perilaku meminta-minta yang dilakukan pengemis. Biasanya hal yang diminta berupa materi seperti uang, pakaian, makanan dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial Indonesia, pada tahun 2012 jumlah pengemis di Indonesia tercatat 178.262 jiwa². Selain itu pada tahun 2012 Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 15, naik ke peringkat 5 dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia.³ Tentu saja prestasi Indonesia dalam kasus tersebut bukan merupakan hal yang patut dibanggakan.

Ada dua tipe pengemis, yakni pengemis miskin materi dan pengemis miskin mental.⁴ Pengemis miskin materi adalah pengemis yang kondisi ekonominya memang sulit atau tidak mampu, sehingga mereka memutuskan

¹ PERDA Kabupaten Sumenep No. 03 tahun 2002 pasal 1 tentang Ketertiban Umum

² www.rii.co.id diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 11.10

³ Dimas, 2013. *Pengemis Undercover*. Titik Media. hal.28

⁴ Ibid hal.5

untuk mencari penghasilan lewat mengemis. Pada tipe ini, pengemis sangat erat berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan. Soerjono Soekanto (1982) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁵

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), konsep kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁶ Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen).⁷ Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang terus diatasi oleh pemerintah negara Indonesia.

Sedangkan pengemis miskin mental adalah pengemis yang kondisi ekonominya masih tergolong mampu, namun mereka tetap mengemis karena mereka memiliki mental malas untuk berusaha mencari penghasilan lewat pekerjaan yang lebih layak.

⁵ Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press (Soekanto, 1982: 10)

⁶ www.bps.go.id diakses pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 17.36 WIB

⁷ Ibid

Menurut Mohammad Ali Al Humaidy dalam tesisnya, secara umum orang mengasumsikan bahwa munculnya pengemis adalah karena himpitan ekonomi, ditambah dengan situasi sosial yang kurang menguntungkan seperti sempitnya lapangan kerja.⁸ Di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk. Hal tersebut membuat jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang profesional, Indonesia masih menjadi negara yang mementingkan kualitas latar belakang pendidikan seseorang. Lapangan pekerjaan yang sempit, jumlah penduduk yang padat dan rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki akan membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kualitas pendidikan yang dimiliki para pengemis juga terbilang sangat buruk. Banyak diantara mereka hanya lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Fenomena tersebut mengakibatkan mereka memilih „jalan pintas“ untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu salah satunya dengan cara mengemis. Mengemis tidak membutuhkan *skill* khusus. Seseorang sudah bisa menjadi pengemis hanya dengan berbekal penampilan *compang-camping* dengan mimik wajah yang membuat orang yang melihatnya merasa iba ketika sedang melakukan kegiatan memintaminta. Kegiatan mengemis dilakukan di beberapa tempat umum seperti lampu merah, pertokoan, pasar tradisional, jembatan penyeberangan, stasiun, tempat ibadah, tempat wisata, angkutan umum hingga ke rumah-rumah masyarakat.

⁸ Mohammad Ali Al Humaidy, 2003. Thesis *Sosialisasi Nilai pada Komunitas Pengemis : Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Sumenep Madura*. Hal.1

Sebuah fenomena unik terjadi di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep – Madura yaitu dimana hampir seluruh penduduk di desa tersebut mencari penghasilan lewat mengemis. Peneliti tidak menemukan fakta bahwa pengemis di desa Pragaan Daya berada dalam kondisi perekonomian yang sulit atau miskin. Bangunan rumah yang megah dengan antena parabola, perhiasan emas yang dikenakan, *handphone*, kendaraan bermotor serta beberapa hewan ternak yang dimiliki oleh para pengemis menjadi bukti bahwa kondisi perekonomian mereka tergolong berkecukupan. Selain itu, kondisi fisik mereka juga masih tergolong kuat dan sehat. Maka pengemis di desa tersebut termasuk tipe pengemis miskin mental.

Masyarakat umum mengasumsikan pengemis berkaitan dengan situasi perekonomian yang sulit, kurang atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maupun keterbatasan fisik dan *soft skill* untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentu saja hal ini menjadi masalah sosial karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu apa yang seharusnya tidak sama dengan yang senyatanya.

Kasus tersebut pun telah membuat MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sumenep mengeluarkan fatwa haram mengemis. Apalagi mengetahui kondisi fisik dan ekonomi para pengemis di desa Pragaan Daya, tentu saja mereka masih mampu mencari uang atau penghasilan dengan cara yang lebih terhormat. Namun, tetap saja para penduduk di desa tersebut menjadikan mengemis sebagai sumber mencari penghasilan.

Menurut hasil razia gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 hingga tahun 2014, tercatat 124 orang menjadi gelandangan dan pengemis. Sebanyak 41 orang atau sekitar 33% dari hasil razia tersebut berasal dari kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Selain memperkuat bukti bahwa fatwa haram yang dikeluarkan MUI di Kabupaten Sumenep tidak dihiraukan oleh para pengemis, hal ini juga membuktikan bahwa para pengemis di desa Pragaan Daya masih beroperasi sampai saat ini.

Dalam tesisnya, Mohammad Ali Al Humaidy juga menjelaskan bahwa mengemis terbagi menjadi dua jenis yakni pengemis konvensional dan non-konvensional. Mengemis konvensional adalah mengemis dengan cara memelas, mengulurkan tangan dengan pakaian *compang-camping* seperti gelandangan. Sedangkan pengemis non-konvensional adalah mengemis dengan penampilan lebih rapi (mengenakan celana atau sarung lengkap dengan kopyah), membawa surat “resmi” dari lembaga/yayasan dan surat jalan dari pemerintah. Pengemis di desa Pragaan Daya menggunakan modus konvensional dan non-konvensional.

Selain fakta yang menyebutkan bahwa para pengemis tersebut berada dalam kondisi perekonomian dan fisik yang baik, hal ini menjadi lebih menarik lagi karena para pengemis di desa Pragaan Daya memanfaatkan perilaku mengemisnya. Perilaku mengemis dimanfaatkan dan digunakan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* dengan seorang oknum yaitu pengurus atau penanggungjawab sebuah madrasah/pondok pesantren yang menyediakan proposal sumbangan fiktif untuk mengemis. Pemanfaatan perilaku mengemis

hanya berlaku pada modus mengemis non-konvensional atau mengemis menggunakan proposal sumbangan fiktif. Hasil yang didapat dari mengemis non-konvensional lebih banyak dibandingkan mengemis konvensional.

Pemanfaatan perilaku mengemis untuk mencari penghasilan merupakan sebuah masalah sosial yang kompleks. Sumber daya manusia yaitu perilaku mengemis yang dimiliki mayoritas masyarakat di desa Pragaan Daya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sumber mencari penghasilan. Hal tersebutlah yang mendorong mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, dengan judul penelitian “Pelebagaan Perilaku Mengemis di “Kampung Pengemis”: Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Bagaimana pelebagaan perilaku mengemis di “Kampung Pengemis” Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab fokus penelitian yaitu pelebagaan perilaku mengemis di “Kampung Pengemis” Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan sebagai media pembelajaran mengenai permasalahan sosial lainnya yang berkembang di masyarakat dalam analisis kelembagaan dan kapital sosial.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan sosiologis mengenai pelebagaan perilaku mengemis.
2. Dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk merancang penelitian yang berkaitan dengan pelebagaan perilaku mengemis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelebagaan perilaku mengemis.
2. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan oleh lembaga sosial atau pemerintahan dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelebagaan perilaku mengemis.

1.5 KERANGKA TEORITIS

1.5.1 Teori Kelambagaan

Lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kabiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.⁹ Norman Uphoff (1986), seorang ahli sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian lembaga lokal, menyatakan sangat sulit sekali

⁹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Hal. 244

mendefinisikan institusi, karena pengertian institusi sering dipertukarkan dengan organisasi.¹⁰

“..... institutions are complexes of norms and behaviors that persist over time serving collectively valued purposes.”¹¹

Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Norman T. Uphoff merupakan salah seorang penggagas *People-Centered Development Forum* mengajukan definisi sederhana yang membedakan antara organisasi (*organization*) dengan kelembagaan (*institution*) sebagai berikut.

“Organizations are structures of recognized and accepted roles. Institutions are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposes.”

Organisasi adalah struktur peran yang telah dikenal dan diterima. Kelembagaan/pranata adalah serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan –atau digunakan- selama periode waktu tertentu –yang relatif lama- untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif/bersama atau maksud-maksud sosial.

Dengan demikian kelembagaan menurut Uphoff (1986) berhubungan dengan pola-pola tindakan individu dalam ruang hidupnya. Dalam kaitannya dengan ini, kelembagaan ditentukan pula oleh tingkatan pengambilan keputusan

¹⁰ www.nuridafatimah.blogspot.com diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 19.54 WIB

¹¹ Norman T. Uphoff. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*.

dalam masyarakat, mulai dari individu hingga internasional (Uphoff, 1986:11). Tingkatan pengambilan keputusan terpenting untuk pembangunan pedesaan berada pada level lokalitas sehingga kemudian ia mengajukan kelembagaan lokal sebagai alternatif pembangunan (*local institution development - LID*). Yang dimaksud dengan kelembagaan level lokal adalah level lokalitas (atau setingkat kota kecamatan di Indonesia), level komunitas (seperti desa di Indonesia), dan level grup (seperti kelompok rumah tangga/Rukun Tetangga di Indonesia).

Pada bagian lain, Norman Uphoff menjelaskan argumentasi pentingnya kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam dan membangun pedesaan (Uphoff:1992,2001). Rasionalisasi bagi kelembagaan lokal itu adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan di level lokal penting untuk memobilisasi sumber daya dan mengatur penggunaannya dengan suatu pandangan jangka panjang terhadap pemeliharaan dan aktivitas produktif.
2. Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara paling efisien dan berkelanjutan karena menggunakan sistem pengetahuan spesifik lokal.
3. Perubahan status sumber daya dapat dipantau secara lebih cepat dengan biaya rendah.
4. Bila kelembagaan lokal tidak mampu menyelesaikan konflik manajemen sumber daya maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada level yang lebih tinggi.
5. Perilaku orang-orang dikondisikan oleh norma-norma dan konsensus komunitas.

6. Institusi menodorong orang-orang untuk menggunakan cara pandang jangka panjang melalui harapan-harapan dan basis kerjasama antar-individu yang berkepentingan.

Menurut sektornya (Uphoff:1986) kelembagaan lokal merupakan suatu kontinum antara sektor publik (*public sector*) dan sektor privat (*privat sector*) (Uphoff, 1986:4-5). Di tengah-tengahnya terdapat sektor antara yang bersifat sukarela (*voluntary sector*) yakni dicirikan oleh ciri-ciri publik dan privat. Urutan kontinum itu adalah administrasi lokal (*local administration*); pemerintahan lokal (*local government*); organisasi sosial berbasis keanggotaan (*membership organizations*) meliputi organisasi dengan tugas jamak, tugas spesifik, dan sesuai kebutuhan anggota; koperasi (*cooperatives*); organisasi bergerak di bidang jasa (*services organizations*); dan bisnis privat (*private business*). Urutan pertama dan kedua adalah kelembagaan sektor publik, urutan ketiga dan keempat sektor sukarela, sedangkan urutan kelima dan keenam adalah sektor privat.

Kelembagaan sebagaimana dimaksudkan oleh Norman Uphoff mengarah pencapaian efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya pedesaan yang meliputi sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, sektor pertanian dan non pertanian (Uphoff, 1986:3). Kelembagaan lokal merupakan salah satu wujud kapital sosial dalam level lokal.

1.5.2 Teori Kapital Sosial

Formulasi kapital sosial secara mudah juga disampaikan oleh Norman Uphoff, teoretisi dari Cornell University. Dengan sistematis, Uphoff (2000:219-220) mengemukakan bahwa konsep kapital sosial bisa dipahami secara mudah dengan membedakan dua kategori fenomena yang saling terkait, yaitu struktural dan kognitif. Kategori struktural diasosiasikan dengan berbagai bentuk organisasi sosial khususnya peran (*roles*), aturan (*rules*), preseden (*precedent*), prosedur (*procedures*), dan beragam model jaringan (*network*) yang memberi kontribusi terhadap perilaku kerjasama (*cooperation*) dan terutama tindakan kolektif yang mempunyai manfaat timbal-balik (*mutually benefit collection action*). Sedangkan kategori kognitif bersumber dari proses mental serta hasil gagasan-gagasan yang diperkuat oleh budaya dan ideologi khususnya norma-norma (*norms*), nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), serta sikap dan perilaku (*attitudes*) yang memberi sumbangan terhadap perilaku kerjasama serta tindakan kolektif lain yang memiliki manfaat timbal-balik. Kedua kategori tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lain.

Bertolak dari pengertian konseptual yang dipaparkan di atas dapat dimengerti bahwa inti dari Kapital Sosial adalah seperangkat norma-norma (*norms*), jaringan-jaringan (*network*), serta kepercayaan sosial (*trust*) yang terlambat pada struktur sosial. Berbagai anasir kapital sosial ini memungkinkan bagi para anggota komunitas tertentu di dalam masyarakat untuk mengkoordinasikan tindakan dan perilaku kerjasama dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang manfaatnya bisa dirasakan secara bersama-sama.

Berdasarkan pengertian konseptual ini para teoretisi sepaham bahwa kapital sosial bukanlah aset pribadi (*private proverty*) yang dimiliki individu terlepas dari konteks keterlekatan mereka pada struktur sosial. Sebaliknya kapital sosial merupakan suatu kepemilikan kelompok (*Property of groups*). Putnam, misalnya menyebut bahwa yang menjadi ciri utama kapital sosial yakni *trust*, *network*, *norms* adalah dimensi kemaslahatan publik (*public good*) yang dikandungnya. Sebagai *public good*, kapital sosial cenderung tidak disediakan oleh agen-agen pribadi. Sebab itu, menurut Putnam (1993), kapital sosial yang secara tipikal terpatri dalam ikatan-ikatan norma-norma dan kepercayaan adalah sesuatu yang dapat dipindah-gerakkan (*transferable*) dari seseorang kepada orang yang lain.

Untuk mengukur terlaksananya Kapital Sosial dalam suatu organisasi, Uphoff (2000) memberikan 4 kategori yakni Kapital Sosial Minimum, Kapital Sosial Elementer, Kapital Sosial Substansial, dan Kapital Sosial Maximum.

1.5.3 Konseptualisasi Permasalahan dengan Teori

Pelebagaan perilaku mengemis akan dianalisis menggunakan teori kelembagaan oleh Norman T. Uphoff. Budaya perilaku mengemis di desa Pragaan Daya telah menjadi sebuah lembaga, dimana perilaku mengemis dimanfaatkan untuk mencari penghasilan dalam jangka waktu yang panjang secara turun-temurun kepada anak-cucu mereka dan berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut yaitu pemanfaatan perilaku mengemis dalam hubungan kerjasama *mutual benefit*.

Perilaku mengemis yang dimanfaatkan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak

melalui hubungan kerjasama dengan oknum-oknum tertentu. Perilaku mengemis yang dimanfaatkan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* ini akan dianalisis menggunakan teori kapital sosial oleh Norman T. Uphoff.

1.6 METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

1.6.1 Paradigma

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma penelitian interpretatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹². Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam. Sehingga pendekatan ini sangat sesuai jika diterapkan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia dan sesuai diterapkan pada penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam dan rinci.¹³

1.6.2 Lokasi Penelitian

Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep adalah lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjek dalam penelitian ini yang banyak terdapat di lokasi tersebut, yaitu fenomena tentang “Pelebagaan Perilaku Mengemis: Studi Deskriptif Pengemis di “Kampung Pengemis” Desa

¹² Lexy J. Moleong 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Hal.3

¹³ Emy Susanti Hendrarso, “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar,” dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (Eds.), dalam *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, 2007, h. 174).

Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”. Adanya kesesuaian antara permasalahan yang diteliti dengan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian serta maraknya isu-isu yang akan diteliti seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian.

1.6.3 Batasan Konsep

A. Pelebagaan

Pelebagaan merupakan penetapan norma, perilaku maupun kebiasaan dalam kegiatan pokok manusia di dalam hidupnya, yang digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan kolektif.

B. Perilaku Mengemis

Dalam penelitian ini, perilaku mengemis merupakan perilaku meminta-minta kepada orang lain yang biasanya berupa uang atau makanan, dengan bermacam-macam modus yang digunakan.

C. Pengemis

Pengemis dalam penelitian ini adalah orang yang memanfaatkan perilaku mengemisnya untuk mencari penghasilan.

1.6.4 Penentuan Subyek Penelitian

Peneliti memilih beberapa informan berdasarkan data yang dibutuhkan dan bersangkutan dengan permasalahan. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu pengemis non-konvensional, pengemis konvensional dan mantan pengemis. Sedangkan informan pendukung/tambahan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu, 2 orang masyarakat sekitar, Dinas Sosial Kabupaten

Sumenep dan MUI Kabupaten Sumenep. Permasalahan dalam penelitian ini berjudul “Pelebagaan Perilaku Mengemis “Kampung Pengemis”: Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”. Karena peneliti telah memahami informasi awal tentang obyek dan subyek penelitian, maka teknik penentuan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara yaitu proses menggali data terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka dan disertai dengan wawancara lebih mendalam terhadap informan (*in-depth interview*). Peneliti interaksionis memandang wawancara sebagai bentuk dari interaksionisme simbolik. Denzin (Mulyana, 2004:182) mengemukakan alasan kebanyakan interaksionis lebih menyukai wawancara terbuka:

- a. Wawancara terbuka memungkinkan responden menggunakan cara-cara unik mendefinisikan dunia.
- b. Wawancara terbuka mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan yang sesuai untuk semua informan.
- c. Wawancara terbuka memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal.

- d. Wawancara terbuka atau wawancara mendalam merupakan teknik wawancara yang selaras dengan pendekatan interaksionisme simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti dan tidak sekedar menjawab pertanyaan.

Wawancara yang dilakukan lebih menyerupai suatu dialog antara peneliti dan subyek penelitian yang dilakukan dengan suasana keakraban dan santai. Dimana dalam proses wawancara peneliti menyesuaikan lokasi wawancara sesuai keinginan informan entah itu rumah informan itu sendiri atau diluar rumah seperti tempat makan, cafe dan lain-lain. Dengan cara ini dapat menggali sebanyak mungkin informasi sehingga memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan lebih memungkinkan mendapatkan info yang unik dan jujur.

Untuk memudahkan proses wawancara dan hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan, maka peneliti menggunakan media handphone dan kamera digital sebagai media untuk merekam hasil wawancara serta mengabadikan moment-moment yang terjadi di lapangan.

2. Observasi/Pengamatan

Teknik observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasisituasi yang rumit dan perilaku yang kompleks. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat menjadi alat yang

sangat bermanfaat. Selain membutuhkan waktu yang lebih banyak, peneliti yakin bahwa dalam suatu observasi terdapat hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari hasil wawancara. Realitas sosial yang ada terdiri dari orang-orang yang mengkonstruksikan dan menciptakan interpretasi melalui interaksi sosial sehari-hari mereka. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengamati kondisi lokasi “Kampung Pengemis” desa Pragaan Daya untuk mengumpulkan data-data yang bersifat primer karena diperoleh langsung dari lapangan.

Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Peneliti hanya mengamati secara langsung kondisi lokasi penelitian yaitu “Kampung Pengemis” desa Pragaan Daya.

3. Studi Pustaka atau Literatur

Studi pustaka atau literatur diperlukan untuk mendapatkan data-data sekunder berupa penelitian yang mungkin berkaitan dan teknik pengumpulan data ini sangat berperan dalam kaitannya dengan kajian teoritik.

4. Dokumentasi (Foto / Video)

Teknik pengumpulan data dokumentasi pada dasarnya merupakan metode tambahan dalam melengkapi data tentang keadaan lokasi penelitian secara fisik ataupun keadaan sosial yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi adalah penelitian terhadap benda-benda tertulis atau dokumen, yang digunakan untuk menunjang data-data yang diperoleh dari hasil wawancara atau data-data primer yang diperoleh secara langsung melalui informan.

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang aktifitas dan tindakan apa saja yang dilakukan, metode yang dilakukan oleh para pengemis meskipun tidak semua mampu diabadikan melalui dokumentasi oleh peneliti.

Dalam dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini, pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera. Dokumentasi ini dilakukan guna mendukung peneliti dalam menggambarkan, menginterpretasi, dan menganalisis data-data primer yang sesuai dengan realitas di lapangan.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk mengumpulkan data, baik yang bersumber dari studi pustaka atau literatur maupun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan disajikan dalam bentuk transkrip. Dalam proses interpretasi ini peneliti tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran dan ide-ide informan dan dikaitkan juga menggunakan teori-teori yang diambil dari studi literatur atau pustaka. Pada tahap pengumpulan data, seluruh data baik hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen maupun foto-foto dikumpulkan dan ditelaah. Data-data tersebut kemudian direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan tema dan kebutuhan dalam fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah dalam menjawab masalah penelitian. Setelah itu, jawaban permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori.